

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2008, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Jr, Raymond McLeod dan George P. Schell. (2008). Management Information System: Sistem Informasi Manajemen, Edisi 10/ Jr. Raymond McLeod dan George P. Schell; Diterjemahkan Oleh: Ali Akbar Yulianto Dan Afia R. Fitriati. Jakarta: Salemba Empat
- Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S. T., & Toth, E. L. (2010). Public Relations: Profesi dan Praktik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. 2005. Sistem Informasi Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital, Edisi 8/ Kenneth C. Laudon And Jane P. Laudon; Diterjemahkan Oleh: Erwin Philippus. Yogyakarta: Andi.
- Maran, Raga Rafael, 2002. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Perdana dkk. (2019). Tata kelola pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.
- Sardini, N. H. 2011. Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Fajar Media Press. Jakarta
- Seligman, G. Lester. 1989. "Perekrutan Kaum Elit Dan Pembangunan Politik Dalam Elit Dan Modernisasi (Ed) Aidit Dan Zaenal AKSP." Liberly, Yogyakarta.
- A. Ahmadi, 2015. Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019. Al-'Adl, 8(1), 1-19, hlm 8
- Artis, 2012, Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia, Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No. 1 Januari-Juli,
- Bryson, J. (2004). What To Do When Stakeholders Matter: A Guide To Stakeholder Identification and Analysis Techniques. Public Management Review, 6(1), 21–53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>

- Ekowati, E Y. (2019). Implementasi Kebijakan Silon: Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Anggota DPRD Surabaya 2019 Perspektif Integritas Pemilu. *Jurnal Politik Indonesia* Edisi 5 (2): 73-80.
- Hidayat, T., & Canta, D. S. (2022). Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Penerapan Aplikasi Go-jek Dengan Menggunakan Metode TAM. *JURIKOM: (Jurnal Riset Komputer)*, 9(2), 472
<https://doi.org/10.30865/jurikom.v9i2.4088>
- Handayani, W.P.P., M. Harsono. (2016). Aplikasi Technology Acceptance Model (TAM) Pada Komputerisasi Kegiatan Pertahanan. *Jurnal Ekonomi*, 12 (1).
- Ifah, N. (2020). Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif 2019. Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia, Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu, Edisi II. Jakarta: KPU.
- Lenti Mardayani Mendrofa & Abdul Kholiq. (2021). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Warga Rukun Tetangga Pada Kelurahan Pengasinan, *Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik LIMIT'S* Vol.17 No 1 Maret.
- Saleh, Z. A. (2018). Demokrasi dan Partai Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1), 56–80. <https://doi.org/10.54629/jli.v5i1.289>
- Yulia Sari, Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 3 No. 2, Mei 2022 www.jurnal.kpu.go.id
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/13461671/silon-sempat-bermasalah-kpu-baik-salahkan-kebiasan-parpol>